



KPK LATIH ANTIKORUPSI PEGAWAI DINZIN Pegawai Diminta Tolak Pemberian Pemohon

YOGYA (MERAPI) - Pegawai yang bekerja di pelayanan publik pemerintah dinilai rentan terhadap praktik korupsi. Pada pelayanan di Dinas Perizinan (Dinzin) misalnya. Untuk mencegahnya, pegawai diminta tidak menerima pemberian dari pemohon izin.

Spesialis Kampanye dan Sosialisasi Kedeputan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Jhanattan mengatakan Dinzin rentan praktik korupsi karena berkaitan dengan pelayanan langsung ke masyarakat. Misalnya agar perizinan cepat keluar ada masyarakat yang memberi amplop.

"Pemberian apapun sebaiknya ditolak. Kami ajarkan bagaimana menolak pemberian itu karena dampaknya bisa jangka panjang. Kita mulai dari pegawai kecil agar tidak menerima suap," tutur Jhanattan usai pelatihan transparansi pelayanan satu pintu kepada pegawai Dinzin Kota Yogyakarta, Selasa (24/3).

Menurutnya 80 persen pegawai di Dinzin sudah memahami praktik tindakan yang mengarah korupsi. Termasuk godaan dan kerentanan korupsi dengan posisi pegawai di Dinzin. Untuk itu pihaknya mendorong agar pegawai tidak menerima suap karena sudah mendapatkan gaji dari pemerintah. Namun hal itu diakunya juga



MERAPI-TRI DARMIYATI

Para pegawai Dinzin Kota Yogyakarta saat sesi simulasi di bus edukasi antikorupsi KPK.

terkait kesejahteraan pegawai. "Kami terima beberapa rekomendasi dari Dinzin terkait peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur penunjang. Butuh kesejahteraan pegawai di daerah untuk mencegah tindak korupsi," paparnya.

Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Indraza Marjuki menambahkan pelatihan itu diadakan karena korupsi di Indonesia masih dalam taraf yang mengkhawatirkan. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hanya 3,2 dari skala 0-10 dan menempati peringkat 114 dari 182 Negara.

"Terkait IPK, layanan publik adalah ukuran untuk menilai IPK di suatu negara. KPK sa-

ngat konsen terhadap perbaikan layanan publik. Ini juga demi membangun layanan publik yang lebih baik," kata Indra.

Sementara itu Kepala Dinzin Kota Yogyakarta Heri Karyawan tidak memungkiri kerentanan praktik korupsi di instansinya. Namun hal itu sudah diantisipasi dengan membangun komitmen menghindari tindak korupsi. Di sisi lain standar operasional prosedur serta mekanisme pelayanan perizinan juga sudah dibuat.

"Pelayanan sudah ada kepastian waktu dan syarat. Tidak ada yang perizinan yang dikeluarkan atau didahulukan atas dasar kedekatan. Jika syarat tidak dipenuhi tidak kami layani," tegas Heri. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005